

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG KERJA SAMA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI KOTA BANDUNG

Rani Septiani¹, Sugih Sugiharta², Rahma Widi Febriarti³, Noer Apptika Fujilestari⁴

sugih.sugiharta12@gmail.com²

Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama internasional untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi dari jurnal ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat lokal dan mitra internasional, menciptakan platform dialog yang produktif untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan masyarakat. Selain itu, kerja sama internasional dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan komunikasi antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jaringan kerja sama. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dengan memberikan wawasan baru mengenai strategi dan praktik terbaik dalam kerja sama internasional.

Kata Kunci: Kerja Sama Internasional, Pemerintah Daerah, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of local governments in establishing international cooperation to achieve sustainable economic development. The method used is a literature study by collecting and analyzing various sources of information from current scientific journals. The results show that local governments serve as a liaison between local communities and international partners, creating a productive dialog platform to convey community needs and challenges. In addition, international cooperation can contribute significantly to community welfare and sustainable economic development. Recommendations include strengthening human resource capacity, improving communication between stakeholders, and utilizing information technology to expand cooperation networks. Thus, this research contributes to the development of knowledge in the field of education by providing new insights into strategies and best practices in international cooperation.

Keywords: International Cooperation, Local Government, Sustainable Development, Economy.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi semakin penting dalam ranah global dan lokal, mengingat tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, seperti perubahan iklim, penurunan sumber daya alam, dan ketidakadilan sosial. Di tingkat global, agenda pembangunan berkelanjutan, seperti yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menekankan perlunya pendekatan yang holistik dan inklusif untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Di sisi lokal, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Namun, pemerintah daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai tujuan ini, termasuk tingginya tingkat kemiskinan yang masih melanda banyak daerah, ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, serta keterbatasan anggaran dan kapasitas dalam mengelola program-program pembangunan. Keterbatasan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mencari solusi inovatif, termasuk menjalin kerja sama internasional, guna meningkatkan akses terhadap sumber daya, teknologi, dan

pengetahuan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif (Djibran, M. M., dkk 2023).

Pentingnya otonomi daerah ini tidak dapat diabaikan, karena otonomi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat (Prabowo, L., & Rafli, M. T. 2020). Dengan memiliki kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih kreatif dan solutif, serta mengimplementasikan proyek-proyek yang langsung menjawab tantangan yang dihadapi oleh komunitas lokal. Otonomi daerah juga mendorong akuntabilitas dan transparansi, karena pemerintah daerah yang lebih dekat dengan warganya cenderung lebih memahami aspirasi dan harapan masyarakat. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif untuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, desentralisasi dan otonomi daerah menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Guntoro, M. 2021).

Kerja sama internasional merujuk pada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan entitas di luar negeri, termasuk negara lain, organisasi internasional, dan lembaga donor, untuk mencapai tujuan pembangunan yang saling menguntungkan. Bentuk-bentuk kerja sama internasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi kemitraan bilateral dengan pemerintah daerah di negara lain, partisipasi dalam jaringan atau asosiasi internasional yang fokus pada isu-isu tertentu, serta kolaborasi dengan organisasi internasional seperti PBB atau lembaga donor yang menyediakan bantuan teknis dan finansial. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat terlibat dalam program pertukaran pengetahuan dan pengalaman, proyek bersama, serta inisiatif pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Iskandar, A. H. 2020).

Manfaat dari kerja sama internasional sangat signifikan dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat mengakses sumber daya yang lebih besar, baik dalam bentuk pendanaan maupun dukungan teknis. Kerja sama internasional juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan teknologi terbaru dan praktik terbaik dari negara lain, yang dapat diadaptasi untuk lokal. Selain itu, pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan mitra internasional dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai pemerintah, serta mendorong inovasi dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan. Dengan demikian, kerja sama internasional tidak hanya membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan (Issundari, S., & Yani, Y. M. 2021).

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah program Sister City. Program Sister City ini mempunyai tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih erat antar kota di berbagai negara. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan teknologi yang mempunyai tujuan untuk saling berbagi mengenai pengetahuan, memperkuat hubungan diplomatik, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kota. Kota Bandung dan Melbourne, Australia bekerja sama pada tahun 2023 dengan fokus di lima sektor utama yaitu, pengembangan kota pintar (smart city), ekonomi dan perdagangan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kota ramah anak, dan dukungan untuk perusahaan rintisan (start-up). Kerja sama antara Kota Bandung dan Melbourne sebagai sister city mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor ekonomi. Kerja sama ini difokuskan pada kemajuan ekonomi yang berbasis inovasi yang berkelanjutan, dengan sasaran utama untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif, perdagangan, serta ekosistem

start-up di Kota Bandung. Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang sebagai pusat industri kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan dalam mengakses pasar internasional serta masih kurangnya infrastruktur pendukung yang setara dengan kota-kota maju lainnya (Efraim Sitinjak, 2020).

Dalam permasalahan ini, Melbourne yang telah dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif dan teknologi di Australia, ditunjuk menjadi mitra strategis untuk membantu Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan melalui pertukaran teknologi, praktik bisnis, dan koneksi di pasar internasional. Melalui kerja sama ini diharapkan Kota Bandung dapat menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung, dengan akses yang lebih besar ke pasar global dan penguatan sektor ekonomi kreatifnya. Kerja sama ini menjadi landasan yang penting dalam memperkuat Kota Bandung sebagai kota yang berdaya saing global, baik dalam segi ekonomi maupun dalam pembangunan berkelanjutan (Nugroho, 2021).

Pemerintah daerah memiliki peran aktif yang krusial dalam menjalin kerja sama internasional, yang mencakup tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Dalam tahap perencanaan, pemerintah daerah harus mengidentifikasi kebutuhan lokal dan potensi yang dapat dimanfaatkan melalui kolaborasi internasional, serta merumuskan tujuan dan rencana aksi yang jelas. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program yang telah disepakati, termasuk koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak dari program-program tersebut, dengan tujuan untuk memperbaiki dan merumuskan strategi baru di masa mendatang. Contoh konkret dari inisiatif kerja sama internasional di Indonesia adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah Yogyakarta dan Gyeongsangbukdo, Korea Selatan, yang berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan daerah pedesaan. Melalui program ini, masyarakat desa di Yogyakarta mendapatkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dukungan dalam membangun unit usaha desa, yang menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Trifita, A. M. J. A. D. 2020).

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah dapat mendorong kerja sama internasional sebagai strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kerja sama internasional, serta mengeksplorasi berbagai model dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar. Berdasarkan temuan dalam penulisan ini rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kerja sama internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal, peningkatan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan program-program yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah daerah juga disarankan untuk aktif mencari mitra internasional yang memiliki visi dan misi sejalan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jaringan kerja sama dan mempromosikan potensi daerah secara global. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerja sama internasional dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penulisan ini memiliki pentingnya yang signifikan bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami peran pemerintah daerah dalam globalisasi dan pembangunan ekonomi. Bagi pengambil kebijakan, hasilnya ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang strategi dan praktik terbaik dalam menjalin kerja sama

internasional, sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah masing-masing. Untuk akademisi, penulisan ini menambah khazanah literatur mengenai hubungan antara pemerintah daerah dan globalisasi, serta memberikan dasar empiris untuk studi lebih lanjut mengenai dampak kerja sama internasional terhadap pembangunan ekonomi. Sementara itu, bagi masyarakat, pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah daerah dalam globalisasi dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan, serta mendorong kesadaran akan pentingnya kolaborasi internasional dalam meningkatkan kesejahteraan lokal. Dengan demikian, penulisan ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Thoha, 2005) Peran didefinisikan sebagai kumpulan tindakan yang dihasilkan dari suatu posisi. Selain itu peran dapat diartikan sebagai kumpulan tindakan yang terjadi secara konsisten sebagai akibat kumpulan tindakan yang terjadi secara konsisten sebagai akibat dari suatu posisi.

Menurut Ryass Rasyid dalam (Salsabila, Arifin, & Mardani, 2020) menekankan peran pemerintah dalam beberapa dimensi, yakni:

1. Pemerintah sebagai Regulator, Peran pemerintah sebagai regulator ialah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
2. Pemerintah sebagai Dinamisator, peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.
3. Pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator kondisi adalah menciptakan yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan ekonomi.

METODOLOGI

Metode studi literatur yang digunakan dalam penulisan mengenai peran pemerintah daerah dalam mendorong kerja sama internasional untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber informasi yang relevan, terutama dari jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (Apriliawati, D. 2020). Proses ini dimulai dengan identifikasi kata kunci yang berkaitan dengan tema penulisan, seperti "kerja sama internasional," "pemerintah daerah," dan "pembangunan ekonomi berkelanjutan." Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian di data Base akademik dan repositori jurnal untuk menemukan artikel, laporan, dan dokumen kebijakan yang membahas topik tersebut. Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, peneliti melakukan analisis kritis terhadap konten, metodologi, dan temuan dari setiap studi, serta mengidentifikasi pola, tantangan, dan praktik terbaik yang muncul dari literatur yang ada. Dengan pendekatan ini, penulisan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menjalin kerja sama internasional dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta menyusun rekomendasi yang berbasis pada bukti empiris yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah memiliki peran strategis yang sangat penting dalam menjalin kemitraan internasional yang saling menguntungkan, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kedekatan mereka terhadap masyarakat dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan lokal, pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan berbagai pihak internasional, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga donor, dan sektor swasta. Mereka dapat memanfaatkan posisi ini untuk menarik investasi asing, mengakses teknologi baru, dan mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan serta pengembangan kapasitas. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan mempromosikan potensi lokal yang unik, seperti sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal, yang dapat menjadi daya tarik bagi mitra internasional. Melalui kemitraan ini, pemerintah daerah tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, peran aktif pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan internasional sangat krusial untuk menciptakan sinergi yang mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Fauzia, A., & Mustafa, A. F. 2024).

Kerja sama Kota Bandung dan Melbourne merupakan kolaborasi strategis yang dimulai untuk memperkuat hubungan budaya, ekonomi, dan pendidikan antara dua kota. Terdapat 5 program yang disepakati, yaitu kota pintar, ekonomi dan perdagangan, pendidikan tinggi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, dan kota layak huni. dalam sektor perekonomian yang berkelanjutan sister city Kota Bandung dan Melbourne mencakup beberapa program untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan seperti:

1. Peningkatan sektor ekonomi kreatif, dalam hal ini Kota Bandung dan Melbourne telah melaksanakan kerja sama di bidang ekonomi seperti fashion, seni, dan kerajinan tangan. Melalui kerja sama ini, Kota Bandung dan Melbourne mempromosikan konsep ekonomi kreatif yang berbasis keberlanjutan, yang berfokus pada penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan pengurangan limbah.
2. Peningkatan sektor ekonomi kreatif, ekspansi sektor ekonomi kreatif ini bisa meningkatkan nilai ekspor produk Kota Bandung ke pasar internasional.
3. Peningkatan pariwisata berkelanjutan, peningkatan jumlah wisatawan berkelanjutan ke Kota Bandung membuka peluang bagi sektor perhotelan, restoran, dan industri jasa. Selain itu, ini menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.
4. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional, kemitraan ini membantu mempercepat implementasi proyek-proyek berkelanjutan dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Kota Bandung. Hal ini juga menciptakan peluang untuk investasi luar negeri yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan

Evaluasi strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan menunjukkan berbagai hasil yang beragam. Beberapa strategi yang berhasil mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor swasta serta lembaga internasional. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan

partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal. Namun, terdapat juga kegagalan yang perlu dicermati, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, ketidakcocokan program dengan kebutuhan lokal, dan keterbatasan sumber daya yang menghambat implementasi strategi secara efektif (Fauzia, A., & Mustafa, A. F. 2024).

Untuk perbaikan di masa depan, pemerintah daerah disarankan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih partisipasi, di mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan inisiatif yang diambil. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal manajemen proyek dan pengelolaan dana juga sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Rekomendasi lainnya termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program, serta pengembangan jaringan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan strategi yang diterapkan dapat lebih berhasil dalam mengatasi kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

Kerja sama internasional memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui transfer teknologi, pengetahuan, dan praktik terbaik dari mitra internasional, pemerintah daerah dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, seperti pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan industri kreatif. Hal ini tidak hanya menciptakan peluang kerja baru, tetapi juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, dengan adanya investasi asing dan dukungan dari lembaga internasional, infrastruktur publik dapat diperbaiki, yang berkontribusi pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kualitas hidup yang lebih baik.

Keterlibatan masyarakat dalam proses kerja sama internasional sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan lokal. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek yang dilaksanakan, tetapi juga dapat memberikan masukan berharga yang dapat memperkuat hasil yang dicapai. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa inisiatif yang diambil lebih relevan dan berkelanjutan, serta mampu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas.

Dalam meningkatkan efektivitas kerja sama internasional, pemerintah daerah perlu mengadopsi beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal manajemen proyek dan pengelolaan dana sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Kedua, peningkatan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan maupun sumber daya manusia, harus menjadi prioritas untuk mendukung implementasi program-program yang direncanakan. Ketiga, pengembangan jaringan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan komunitas internasional, dapat memperkuat sinergi dan memaksimalkan dampak dari kerja sama yang dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerja sama internasional dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendorong kerja sama internasional untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja sama tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk mengadopsi beberapa

rekomendasi kebijakan, seperti penguatan kapasitas manajemen proyek dan pengelolaan dana, peningkatan sumber daya, serta pengembangan jaringan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kerja sama internasional dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk aktif mencari mitra internasional yang sejalan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jaringan kerja sama serta mempromosikan potensi daerah secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, D. (2020). Diary study sebagai metode pengumpulan data pada riset kuantitatif: Sebuah literature review. *Journal of Psychological Perspective*, 2(2), 79-89.
- Cahyandari, A. T., & Pradana, G. w. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Publika*, 10(1), 159-174.
- Djibran, M. M., Andiani, P., Nurhasanah, D. P., & Mokoginta, M. M. (2023). Analisis Pengembangan Model Pertanian Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek Sosial dan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(10), 847-857.
- Efraim Sitinjak, d. (2020). Promoting Sister City Concept For Sustainable And Resilient Cities: Indonesian Cities In The Face Of Climate Change. *Ecodevelopment Journal*, Vol. 3(No.1).
- Fauzia, A., & Mustafa, A. F. (2024). Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-17: Kemitraan untuk mencapai tujuan dan implikasinya pada lembaga bidang pangan Indonesia (studi di Badan Pangan Nasional). *Jurnal Inovasi Pangan dan Gizi*, 1(1), 21-33.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan otonomi daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1-9.
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). Implementasi pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan melalui kerja sama internasional daerah. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1)
- Mahadewi, C., & dkk. (2023). Analisis Paradiplomasi Kota Bandung Melalui Progam Sister City Dalam Meningkatkan Kerjasama Internasional Dan Pembangunan Daerah. *Researchget.net*, 1-10.
- Nugroho, R. B. (2021). Keuntungan Kota Bandung Dalam Melakukan Kerja Sama Sister City Dengan Kota Melbourne Australia (Periode 2019-2021). *Skripsi*.
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh otonomi daerah terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20-28.
- Salsabila, J., Arifin, J., & Mardani, E. (2020). PERan Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 3(1), 107-122.
- Sianipar, R. T., SE, M. A., Silitonga, H. P., Ady Inrawan, S. E., Siregar, M. I. R. T., SI, M., & Nainggolan, P. C. D. (2023). Penguatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
- Thoha, M. (2005). *Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Trifita, A. M. J. A. D. (2020). Strategi Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dan UCLG ASPAC (United Cities Local Government Asia-Pacific) Dalam Merespon Urbanisasi Melalui Global Public Space Programme Di Surabaya. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.